

**OPTIMALISASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI LUAR  
KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Muhammad Hafist Reyhan Fariza  
NPP 32.0788

*Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur  
Studi Kependudukan Dan Pencatatan  
Email: 32.0788@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi:  
Prof. Dr. H. Mansyur Achmad, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The relatively low number of digital population identity (IKD) activations in Samarinda City compared to the national target of 30% set by the Ministry of Home Affairs, along with the public's limited awareness of the importance of activating their digital identity. **Purpose:** To analyze the optimization of digital population identity (IKD) activation services conducted outside the office of the Population and Civil Registration Office of Samarinda City. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. **Result:** The study reveals efforts to optimize IKD activation services outside the office to improve service performance and reach a wider community. Challenges include low digital literacy, technological limitations, and ineffective public outreach strategies. **Conclusion:** Despite existing obstacles, the local government has undertaken several initiatives such as human resource training, cross-sector collaboration, and regulatory strengthening to support the effectiveness of digital population administration services.*

**Keywords:** *Activation, IKD, Optimization*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masih rendahnya jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Samarinda dibandingkan dengan target nasional sebesar 30% yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan aktivasi IKD. **Tujuan:** Untuk menganalisis optimalisasi pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di luar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. **Metode:** Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pelayanan aktivasi IKD di luar kantor telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan dan memperluas jangkauan kepada masyarakat.

Ditemukan beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan teknologi, dan kurang efektifnya kegiatan sosialisasi. **Kesimpulan:** Pemerintah daerah telah melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan aktivasi IKD, antara lain melalui pelatihan sumber daya manusia, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan regulasi untuk mendukung terwujudnya layanan administrasi kependudukan yang lebih efektif di era digital.

**Kata Kunci:** Aktivasi, IKD, Optimalisasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara. Dalam era digitalisasi yang terus berkembang pesat, pelayanan publik dituntut untuk bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi agar lebih efektif, efisien, dan menjangkau masyarakat secara luas. Pemerintah, melalui berbagai instansi, harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, masyarakat juga diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan ini agar dapat mengakses berbagai program pemerintah dengan mudah dan tepat. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program digitalisasi tidak menimbulkan kesenjangan pelayanan (Situru et al., 2023).

Salah satu bentuk transformasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dalam bidang administrasi kependudukan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan inovasi berupa Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai upaya modernisasi pelayanan administrasi. Layanan digital ini bertujuan untuk menggantikan bentuk fisik KTP elektronik dengan sistem identitas berbasis aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone. Dengan inovasi ini, masyarakat diharapkan dapat dengan mudah mengakses data kependudukan mereka secara online, yang mencakup informasi penting seperti KTP, KK, NPWP, dan BPJS. IKD menjadi salah satu solusi penting untuk menjawab tantangan pelayanan kependudukan di tengah mobilitas masyarakat yang semakin tinggi dan kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih fleksibel (Dinta Fernanda Maulidya & Agus Widiyarta, 2024).

Secara konseptual, kependudukan merupakan bidang yang mencakup studi mengenai berbagai variabel demografi serta keterkaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Kajian ini meliputi jumlah, pertumbuhan, distribusi, mobilitas, kualitas, dan kesejahteraan penduduk. Dalam konteks administrasi publik, pelayanan kependudukan memiliki posisi strategis karena menyangkut identitas dan hak-hak sipil warga negara yang bersifat mendasar. Oleh karena itu, pengelolaan data kependudukan harus dilakukan secara akurat, cepat, dan aman, serta didukung oleh sistem yang mampu menjamin kerahasiaan dan integritas data (Masiero, 2023).

Peluncuran Identitas Kependudukan Digital diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas

Kependudukan Digital. Permendagri ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan layanan IKD. Dalam praktiknya, implementasi IKD memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan, serta mengurangi potensi pemalsuan identitas yang selama ini menjadi salah satu permasalahan dalam administrasi kependudukan. Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak terlepas dari tantangan, khususnya terkait kesadaran dan literasi digital masyarakat yang masih rendah, serta infrastruktur teknologi yang belum merata (Masiero & Bailur, 2021).

Masalah lain yang muncul adalah masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD. Salah satu kasus yang mencerminkan tantangan ini dapat ditemukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan target aktivasi IKD sebesar 30 persen dari jumlah wajib KTP yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Target ini diterapkan secara nasional dan menjadi indikator keberhasilan implementasi program IKD di setiap daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda tahun 2024 semester II, jumlah total penduduk Kota Samarinda adalah 861.878 jiwa, dengan 619.086 jiwa di antaranya telah melakukan perekaman KTP elektronik. Maka, target aktivasi IKD yang harus dicapai Kota Samarinda adalah sebanyak 185.725 jiwa (Zam, 2021).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa angka aktivasi IKD di Kota Samarinda masih jauh dari target yang ditetapkan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda per 17 Januari 2024, jumlah masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD baru mencapai 38.594 orang. Jika dibandingkan dengan target 185.725 jiwa, maka pencapaian ini baru sekitar 20 persen dari target yang ditetapkan. Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun ada kenaikan dari tahun ke tahun—yakni 35.967 orang pada tahun 2023, 37.678 orang pada 2024, dan 38.594 orang pada awal 2025—kenaikan tersebut belum signifikan dan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini masih rendah. (Disdukcapil Kota Samarinda, 2025)

Fenomena rendahnya tingkat aktivasi IKD di Kota Samarinda menjadi cerminan dari tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan kependudukan berbasis digital. Berbagai faktor turut mempengaruhi kondisi ini, di antaranya adalah minimnya literasi digital di kalangan masyarakat, keterbatasan perangkat teknologi seperti smartphone dan jaringan internet, serta kurang efektifnya sosialisasi program IKD. Hal ini menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan tersebut, di antaranya dengan menyelenggarakan layanan aktivasi IKD di luar kantor dinas, misalnya melalui mobil layanan keliling, pos pelayanan di kecamatan dan kelurahan, serta kolaborasi dengan instansi lain seperti sekolah, universitas, dan pusat perbelanjaan (Mara et al., 2022).

Selain itu, untuk mendorong optimalisasi program, diperlukan pelatihan kepada sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan publik, terutama petugas frontliner di kantor dan lapangan agar dapat melayani masyarakat dengan ramah, cepat, dan solutif. Pemerintah Kota Samarinda juga perlu memperkuat regulasi dan dukungan anggaran untuk memperluas jangkauan serta intensitas kegiatan sosialisasi. Pendekatan berbasis komunitas, edukasi langsung kepada warga, serta pemanfaatan media sosial dan media lokal menjadi sarana penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks inilah, penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana upaya optimalisasi

pelayanan aktivasi IKD di luar kantor Disdukcapil dapat dijalankan secara maksimal di Kota Samarinda.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terkait inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Penelitian ini berfokus pada strategi optimalisasi layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di luar kantor resmi, dengan menekankan pada efektivitas implementasi, kendala yang dihadapi, dan solusi-solusi yang telah atau dapat diterapkan untuk mencapai target nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pelayanan publik berbasis digital serta memperkuat kebijakan-kebijakan pelayanan kependudukan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, peneliti mengangkat judul “Optimalisasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Luar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur” sebagai fokus utama penelitian ini.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji pelayanan administrasi kependudukan, khususnya mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD), umumnya hanya memusatkan perhatian pada aspek teknis dan kebijakan penerapan IKD secara umum dalam ruang lingkup nasional maupun regional. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh (Orlando & Jamiah, 2022), serta (Rohmah et al., 2022), lebih menyoroti pemahaman konsep IKD, manfaat digitalisasi pelayanan kependudukan, serta hambatan dalam internal sistem birokrasi dan infrastruktur teknologi. Di sisi lain, aspek implementasi langsung di lapangan, khususnya di luar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), masih jarang menjadi fokus utama penelitian.

Padahal, keberhasilan aktivasi IKD sangat bergantung pada strategi jemput bola atau pelayanan di luar kantor, mengingat tidak semua warga memiliki waktu atau akses untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil. Di Kota Samarinda, meskipun telah dilakukan upaya-upaya aktivasi IKD, realisasinya masih jauh dari target 30 persen yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data Disdukcapil Kota Samarinda tahun 2025, dari target 185.726 penduduk, jumlah aktivasi baru mencapai sekitar 38.594, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi.

Sayangnya, kajian yang secara spesifik membahas optimalisasi pelayanan aktivasi IKD di luar kantor Disdukcapil—baik dari sisi strategi, efektivitas lapangan, maupun kendala teknis dan sosial—masih minim. Kebanyakan penelitian sebelumnya juga belum mengupas secara mendalam faktor-faktor penghambat eksternal seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sosialisasi, serta respon masyarakat terhadap pelayanan mobile.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada analisis upaya optimalisasi aktivasi IKD yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Samarinda di luar kantor pelayanan utama, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan kebijakan pelayanan publik yang lebih responsif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam memberikan pijakan awal bagi penelitian yang sedang dilakukan, karena dapat menjadi acuan dan pembanding yang relevan untuk melihat kesesuaian topik, pendekatan, serta temuan yang dapat dijadikan landasan teoritis dan praktis. Dalam konteks penelitian ini yang berjudul “*Optimalisasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Luar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur*”, peneliti mengacu pada beberapa studi terdahulu yang relevan guna memperkaya analisis serta membangun argumen penelitian yang lebih kuat dan terstruktur. Lima penelitian berikut memberikan perspektif penting tentang implementasi, kendala, serta efektivitas program identitas kependudukan digital (IKD) di berbagai wilayah Indonesia.

Penelitian pertama dilakukan oleh (Widiyarta & Humaidah, 2023) yang berjudul “*Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya*”, yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Studi ini memfokuskan analisisnya pada implementasi kebijakan IKD di tingkat kelurahan, tepatnya di Jepara, Kota Surabaya. Menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III, penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan aktivasi IKD di Jepara telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam mengaktifkan IKD. Studi ini menunjukkan pentingnya komunikasi, sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan lokal dalam keberhasilan program digitalisasi layanan administrasi kependudukan.

Selanjutnya, penelitian oleh (Romawati et al., 2024) yang berjudul “*Peningkatan Cakupan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Wonorejo*” memberikan kontribusi penting dalam aspek partisipasi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif. Penelitian ini dipublikasikan dalam *Journal of Human and Education (JAHE)* dan merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa magang MSIB Batch 5 di Dispendukcapil Kota Surabaya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan cakupan aktivasi IKD di wilayah Kelurahan Wonorejo. Melalui metode penyebaran informasi, baik melalui media sosial maupun pendekatan langsung, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dan pendekatan yang komunikatif mampu meningkatkan tingkat aktivasi IKD secara signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi sosialisasi yang efektif, ditambah kolaborasi antar pemangku kepentingan, mampu mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan ke arah digital.

Penelitian lain yang relevan berasal dari (Aulia & Rahmadanik, 2023) dalam artikelnya berjudul “*Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Jawa Timur*” yang diterbitkan dalam *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. Fokus utama dari penelitian ini adalah pelaksanaan pelayanan IKD di Kelurahan Kalirungkut, dengan penekanan pada aspek pelaksanaan teknis dan kendala lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pelayanan IKD diadakan di balai RW dan mempermudah akses bagi warga, terutama lansia, namun masih terdapat hambatan seperti kendala teknis pada sistem informasi administrasi kependudukan (SIKAD) yang kadang tidak stabil. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pelatihan petugas layanan

dan komunikasi yang efektif untuk menjelaskan jadwal serta teknis pelaksanaan kepada warga. Dari sini dapat dipahami bahwa optimalisasi pelayanan IKD tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukung yang handal.

Sementara itu, (Yulanda & Frinaldi, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul *“Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia”*, memberikan gambaran dari perspektif makro terhadap implementasi IKD di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan menganalisis peran inovasi dalam mendorong kualitas layanan administrasi publik. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa IKD merupakan solusi atas berbagai permasalahan administrasi seperti kehilangan dokumen, kerusakan fisik e-KTP, dan pemalsuan data kependudukan. Di sisi lain, tantangan utama dari program ini adalah masih rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya di kalangan lanjut usia dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan program IKD sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi serta kapasitas masyarakat dalam menggunakan layanan digital.

Penelitian terakhir yang dijadikan acuan dalam studi ini adalah karya (Permadi & Rokhman, 2023) berjudul *“Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi”*, yang dimuat dalam *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*. Studi ini menyoroti aspek keamanan data pribadi sebagai isu utama dalam pelayanan publik berbasis digital. Dalam konteks penyediaan layanan administrasi kependudukan secara daring, risiko kebocoran data menjadi sangat relevan. Penelitian ini mengkaji bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas berupaya mengamankan data pribadi melalui sistem aplikasi IKD berbasis Android. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun IKD menawarkan efisiensi dalam pelayanan, namun edukasi terhadap masyarakat mengenai manfaat dan keamanan sistem ini masih minim. Dibutuhkan upaya edukatif yang masif agar masyarakat tidak hanya memahami cara mengakses layanan, tetapi juga mengetahui bagaimana data mereka dilindungi oleh sistem.

Kelima penelitian tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai aspek penting dalam implementasi identitas kependudukan digital di Indonesia. Dari sisi implementasi teknis, sosialisasi, kolaborasi antar pihak, hingga aspek perlindungan data pribadi, semua penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan IKD sangat bergantung pada strategi yang terintegrasi antara pemerintah daerah, penyedia layanan, dan masyarakat sebagai pengguna. Penelitian-penelitian tersebut juga mempertegas bahwa aktivasi IKD bukan hanya sekadar perubahan format dari fisik ke digital, tetapi juga merupakan upaya reformasi layanan publik yang menuntut perubahan pola pikir, peningkatan kapasitas teknologi, serta kepercayaan publik terhadap sistem digital yang transparan dan aman.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan memfokuskan pada konteks geografis dan sosial yang berbeda, yakni di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi aktivasi IKD dapat dilakukan di luar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta apa saja faktor penghambat dan upaya strategis yang dilakukan. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pelayanan publik digital yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus, konteks geografis, serta pendekatan implementatif yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Studi ini berjudul “*Optimalisasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Luar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur*”, dengan penekanan utama pada aktivasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara mobile dan non-konvensional (di luar kantor Disdukcapil). Hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya memusatkan perhatian pada pelaksanaan IKD di lingkungan kelurahan (Widiyarta & Humaidah, 2023; Aulia & Rahmadanik, 2023), peningkatan cakupan melalui sosialisasi dan kolaborasi mahasiswa magang (Romawati et al., 2024), maupun pada isu-isu makro seperti inovasi kebijakan (Yulanda & Frinaldi, 2023) dan keamanan data pribadi (Permadi & Rokhman, 2023).

Kebaruan penelitian ini juga tampak dalam eksplorasi strategi optimalisasi aktivasi IKD secara langsung di lokasi publik atau pelayanan terpadu, yang lebih menekankan pendekatan jemput bola, partisipasi masyarakat lokal, serta integrasi antara teknologi dan responsivitas petugas lapangan. Belum ditemukan penelitian sebelumnya yang secara spesifik menyoroti bagaimana strategi pelayanan di luar kantor resmi dapat memperluas jangkauan aktivasi IKD secara signifikan, khususnya dalam konteks geografis Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik wilayah dan masyarakat berbeda dari studi di Pulau Jawa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian implementasi IKD di daerah luar Jawa, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merancang model pelayanan digital yang lebih fleksibel dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Inilah yang menjadi nilai tambah dan kebaruan ilmiah utama dari penelitian ini.

#### **1.5. Tujuan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan di luar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor penghambat yang dihadapi dalam proses optimalisasi aktivasi IKD tersebut. Selain itu, penelitian ini berfokus pada upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Samarinda dalam meningkatkan efektivitas pelayanan aktivasi IKD di luar kantor, sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang inklusif dan merata.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena sosial dengan menggambarkan realitas di lapangan secara utuh dan kontekstual. Menurut Nazir (2014), pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna, pengalaman, dan interpretasi subjek terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang diteliti, dibandingkan dengan sekadar angka atau statistik. Pendekatan ini relevan karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara logis, objektif, dan sistematis bagaimana optimalisasi pelayanan luar kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Sugiyono, 2017).

Metode deskriptif digunakan untuk menyusun pemaparan fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk angka, melainkan narasi, pendapat, serta dokumentasi visual dan tertulis yang relevan. Peneliti menerapkan pendekatan induktif, di mana pengumpulan data dilakukan secara terbuka dan fleksibel untuk membentuk pola-pola pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Moleong, 2013). Dalam hal ini, penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk menggali secara mendalam informasi dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan luar kantor oleh Disdukcapil Kota Samarinda (Marhaeni, 2020).

Konsep utama dalam penelitian ini adalah "Optimalisasi", sebagaimana dirumuskan oleh Mardiasmo yang mencakup tiga dimensi, yaitu pencapaian output, pencapaian outcome, dan pencapaian impact. Ketiga dimensi ini dijadikan sebagai acuan dalam operasionalisasi konsep penelitian dan digunakan untuk menentukan fokus pengumpulan data. Data yang diperoleh bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi Disdukcapil Kota Samarinda dan sumber tertulis lainnya yang relevan (Nggeru, 2020).

Peneliti menetapkan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan terdiri dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat Kota Samarinda yang menerima pelayanan luar kantor. Informan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Optimalisasi Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Luar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Optimalisasi merupakan upaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas tertinggi dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelayanan publik, optimalisasi sangat penting guna memastikan bahwa layanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat guna dan tepat sasaran. Pelayanan administrasi kependudukan, termasuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), menjadi salah satu layanan yang menuntut optimalisasi agar proses transisi dari sistem konvensional ke digital berjalan dengan lancar. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana optimalisasi pelayanan aktivasi IKD di luar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan menggunakan teori optimalisasi dari Mardiasmo yang menekankan pada tiga dimensi utama, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*.

IKD merupakan program nasional yang telah diluncurkan pada tahun 2022 oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan dari program ini adalah untuk mentransformasi sistem administrasi kependudukan dari bentuk fisik menjadi digital, sehingga

mempermudah proses verifikasi data dan pelayanan publik secara luas. Di Kota Samarinda, aktivasi IKD tidak hanya dilakukan di kantor Disdukcapil tetapi juga dilakukan secara langsung di berbagai lokasi luar kantor, seperti mall pelayanan publik, acara peringatan hari besar, serta kantor kecamatan dan kelurahan, guna menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Disdukcapil Kota Samarinda, Bapak Eko Suprayetno, S.Sos, pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa pelaksanaan aktivasi IKD merupakan mandat dari pemerintah pusat. Beliau menyatakan bahwa transformasi digital ini sangat penting dalam mendukung efisiensi pelayanan publik dan perlindungan data penduduk. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Bapak Didik Purwanto, S.STP, M.Si yang menyebutkan bahwa peralihan dari KTP konvensional ke IKD bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan serta meningkatkan keamanan data pribadi.

Dari segi output, pelaksanaan aktivasi IKD di luar kantor Disdukcapil telah menunjukkan hasil nyata, yaitu tersedianya sarana prasarana dan tenaga operator di berbagai titik pelayanan. Kegiatan aktivasi IKD telah dilaksanakan dalam berbagai kesempatan seperti HUT Kalimantan Timur ke-68, dimana Disdukcapil membuka stand khusus untuk melayani aktivasi IKD. Hal ini memperlihatkan adanya keseriusan instansi dalam memperluas jangkauan pelayanan hingga ke luar gedung. Selain itu, pelaksanaan kegiatan aktivasi di Mall Pelayanan Publik juga menjadi salah satu bentuk nyata dari optimalisasi output, di mana masyarakat bisa langsung melakukan aktivasi saat mengurus dokumen lain.

Namun demikian, dari segi *outcome*, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD. Berdasarkan wawancara dengan staf operator, Bapak Haris, disebutkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pemahaman antara generasi muda dan masyarakat usia lanjut. Masyarakat muda cenderung lebih antusias dan mudah diarahkan untuk melakukan aktivasi IKD, sedangkan masyarakat lanjut usia membutuhkan pendekatan yang lebih intensif karena keterbatasan dalam penggunaan teknologi.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Kepala Disdukcapil, Bapak Eko Suprayetno, yang menyebutkan bahwa pencapaian target aktivasi masih jauh dari target nasional sebesar 30% dari jumlah wajib KTP di Kota Samarinda. Salah satu penyebab utama rendahnya pencapaian tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebermanfaatannya IKD. Oleh karena itu, ke depan akan dilakukan sinkronisasi antara IKD dan berbagai layanan publik, baik di sektor pemerintah maupun swasta, agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari penggunaan IKD.

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan peneliti di lokasi seperti Mall Pelayanan Publik dan kantor kecamatan, diketahui bahwa fasilitas aktivasi IKD cukup memadai dan tenaga operator juga telah dibekali dengan pelatihan terkait teknologi informasi. Namun, antusiasme masyarakat untuk datang dan melakukan aktivasi masih bergantung pada intensitas sosialisasi yang dilakukan. Oleh sebab itu, dalam dimensi *outcome*, perlu dilakukan peningkatan dalam hal komunikasi publik dan pendekatan edukatif kepada masyarakat.

Untuk mencapai dimensi *impact*, yakni transformasi digital total di bidang administrasi kependudukan, Disdukcapil Kota Samarinda telah merancang berbagai strategi percepatan. Salah satunya adalah dengan membuka tenan atau stan pelayanan IKD dalam setiap acara yang melibatkan banyak masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara lebih masif dan

meningkatkan jumlah aktivasi. Selain itu, evaluasi rutin terhadap pencapaian target juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas strategi yang telah dijalankan.

Lebih jauh, Kepala Bidang PIAK, Bapak Didik Purwanto, menyebutkan bahwa dukungan sumber daya manusia telah optimal, namun tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, Disdukcapil akan melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan seluruh pegawai telah melakukan aktivasi IKD. Hal ini merupakan bagian dari pendekatan internal sebelum melakukan pendekatan yang lebih luas kepada masyarakat umum.

Penting juga untuk dicatat bahwa optimalisasi pelayanan IKD tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis seperti ketersediaan fasilitas dan SDM, tetapi juga membutuhkan pendekatan budaya dan sosial. Upaya mengubah perilaku masyarakat agar mau beralih dari sistem konvensional ke sistem digital memerlukan waktu dan konsistensi. Oleh karena itu, kegiatan gebyar aktivasi IKD yang dilakukan secara berulang di 10 kecamatan dan 59 kelurahan menjadi strategi penting dalam mengakselerasi perubahan perilaku ini.

Dalam kerangka teori optimalisasi Mardiasmo, dapat disimpulkan bahwa dari segi *output*, Kota Samarinda telah berhasil menghadirkan sarana aktivasi dan tenaga operator yang memadai. Dari sisi *outcome*, kemudahan akses dan kenyamanan layanan telah mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat meskipun masih banyak yang belum memahami manfaat dari IKD. Sedangkan dari sisi *impact*, potensi transformasi digital di bidang administrasi kependudukan sangat besar, namun implementasinya masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat itu sendiri.

Disdukcapil Kota Samarinda juga menegaskan bahwa target pencapaian nasional sebesar 30% pada tahun 2025 akan terus dikejar melalui strategi aktif seperti membuka pelayanan pada acara besar, melakukan sosialisasi di lingkungan kerja pemerintah, serta memperkuat kolaborasi lintas sektoral. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menjadikan IKD sebagai identitas utama masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara digital, sehingga efisiensi dan keamanan data kependudukan dapat terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di luar kantor Disdukcapil Kota Samarinda telah menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi dan penerimaan masyarakat. Perlu adanya pendekatan yang lebih masif, kolaboratif, dan inovatif untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Samarinda dapat terjangkau dalam program transformasi digital ini.

Dengan demikian, untuk mewujudkan optimalisasi secara menyeluruh, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah perlu terus mendorong upaya inovatif dalam pelayanan publik, sedangkan masyarakat juga diharapkan lebih terbuka terhadap perubahan menuju sistem digital. Transformasi digital bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan kebutuhan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang efisien, aman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **3.2. Upaya dalam mengatasi faktor penghambat optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Samarinda**

Upaya dalam mengatasi faktor penghambat optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Samarinda dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan-Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda. Langkah pertama yang diambil adalah dengan memperluas cakupan layanan aktivasi melalui kegiatan gebyar pelayanan yang dilakukan secara masif di 10 kecamatan dan 59 kelurahan, serta berbagai event masyarakat, termasuk yang dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan mempermudah akses terhadap aktivasi IKD, terutama bagi warga yang berada di wilayah padat penduduk maupun wilayah terpencil. Selain itu, Disdukcapil juga mengupayakan penguatan infrastruktur teknologi informasi dengan cara melakukan evaluasi dan koordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Dukcapil pusat guna mengatasi kendala teknis seperti gangguan jaringan dan server yang tidak stabil, yang selama ini menjadi penghambat utama dalam proses aktivasi.

Langkah selanjutnya yang diambil adalah meningkatkan intensitas sosialisasi dan promosi IKD kepada masyarakat luas. Sosialisasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung meliputi kunjungan ke sekolah-sekolah, perkantoran, universitas, serta melalui pembukaan stand di berbagai event publik. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, yang dinilai efektif menjangkau generasi muda dan kelompok masyarakat yang aktif di dunia digital. Upaya ini didukung oleh pernyataan Kepala Bidang PIAK dan operator lapangan yang menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan komunikatif agar masyarakat memahami manfaat dan urgensi penggunaan IKD dalam kehidupan sehari-hari.

Regulasi juga menjadi sorotan penting dalam optimalisasi IKD. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengusulkan kepada pemerintah pusat agar memperkuat regulasi yang mewajibkan penggunaan IKD dalam berbagai layanan publik. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk segera mengaktivasi IKD sebagai bagian dari kebutuhan administrasi sehari-hari. Dalam konteks teori optimalisasi menurut Mardiasmo, upaya-upaya ini mencerminkan dimensi output berupa pelaksanaan gebyar layanan aktivasi, outcome berupa peningkatan pemahaman dan ketertarikan masyarakat terhadap layanan digital, serta impact yang terlihat dari transformasi sistem administrasi kependudukan menuju digitalisasi yang efisien dan adaptif terhadap teknologi.

Melalui observasi di lapangan, seperti pelaksanaan pelayanan pada perayaan HUT Kalimantan Timur dan di Kecamatan Samarinda Ulu, terlihat bahwa staf Disdukcapil telah memiliki kapasitas dan pemahaman yang baik dalam memberikan layanan aktivasi IKD. Peneliti juga menemukan bahwa dukungan pusat dalam hal distribusi blangko KTP-Elektronik serta monitoring jaringan IT menjadi aspek krusial dalam mendukung keberhasilan program ini. Keseluruhan upaya tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Samarinda untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang lebih modern, efisien, dan inklusif melalui optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman dan Setiawan (2023) mengenai digitalisasi pelayanan publik di Kota Bandung, penelitian ini juga menemukan bahwa optimalisasi pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di luar kantor Disdukcapil sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Temuan Rahman dan Setiawan menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik membutuhkan sinergi antara teknologi, SDM, dan pendekatan sosial budaya, yang sejalan dengan hasil penelitian ini di Kota Samarinda. Hal ini memperkuat temuan tersebut karena dalam konteks Samarinda, selain sarana dan prasarana yang sudah tersedia, faktor kesadaran masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan optimalisasi layanan.

Berbeda dengan temuan penelitian oleh Lestari (2022) di Kota Surabaya yang menyatakan bahwa hambatan utama pada pelayanan digital adalah masalah teknis seperti gangguan jaringan dan keterbatasan perangkat keras, penelitian ini menunjukkan bahwa kendala teknis sudah relatif teratasi berkat koordinasi intensif antara Disdukcapil Kota Samarinda dan Direktorat Jenderal Dukcapil pusat. Namun demikian, temuan ini menolak anggapan bahwa aspek teknis adalah hambatan terbesar, melainkan menegaskan bahwa tantangan utama justru terletak pada rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat IKD, khususnya pada kelompok usia lanjut. Perbedaan karakteristik objek penelitian ini menjelaskan perbedaan temuan tersebut.

Temuan ini juga memperkuat penelitian sebelumnya oleh Hidayat dan Nugroho (2024) yang menyatakan bahwa pendekatan edukatif dan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan adalah faktor penting dalam mendorong adopsi layanan digital oleh masyarakat. Sama halnya dengan temuan mereka, penelitian ini menegaskan bahwa sosialisasi yang efektif dan kolaborasi lintas sektor merupakan strategi yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses aktivasi IKD, khususnya di wilayah yang cakupannya luas dan beragam seperti Kota Samarinda. Pendekatan ini menunjukkan hasil positif meskipun belum sepenuhnya mencapai target nasional.

Selain itu, penelitian ini memberikan penegasan tambahan bahwa transformasi digital tidak hanya soal implementasi teknologi, tetapi juga perubahan budaya dan perilaku masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian Santoso (2021) yang menyoroti pentingnya aspek budaya dalam digitalisasi pelayanan publik. Temuan penelitian ini juga memperkuat pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan inklusif.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi beberapa aspek dari penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai urgensi peningkatan sosialisasi dan edukasi sebagai strategi utama optimalisasi aktivasi IKD di luar kantor Disdukcapil Kota Samarinda. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi kendala sosial budaya dalam transformasi digital pelayanan publik.

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa faktor penghambat yang cukup signifikan memengaruhi pelaksanaan indikator penelitian. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan program secara optimal. Keterbatasan ini menyebabkan pelaksanaan beberapa indikator tidak berjalan sesuai dengan target

yang diharapkan. Selain itu, minimnya pelatihan dan pembinaan juga menjadi kendala dalam meningkatkan kemampuan staf sehingga berdampak pada penurunan efektivitas kinerja.

Di sisi lain, faktor pendukung juga ditemukan dalam penelitian ini yang berkontribusi positif terhadap pencapaian indikator. Dukungan penuh dari pimpinan dan komitmen seluruh anggota tim menjadi modal utama dalam menjalankan program dengan baik. Selain itu, adanya sistem monitoring dan evaluasi secara berkala turut membantu dalam mengidentifikasi hambatan sejak dini dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dukungan fasilitas pendukung seperti teknologi informasi yang memadai juga mempercepat proses kerja dan meningkatkan akurasi data yang dihasilkan.

Temuan menarik lainnya terkait dengan aspek komunikasi internal yang masih perlu ditingkatkan. Kurangnya koordinasi antar divisi terkadang menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik, sehingga terjadi kesalahpahaman dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme komunikasi dan peningkatan budaya kerja sama menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar efektivitas pelaksanaan indikator dapat lebih optimal.

Temuan ini mengindikasikan bahwa selain faktor teknis dan sumber daya, aspek manajerial dan komunikasi juga memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu program. Penulis merekomendasikan agar pada penelitian selanjutnya, fokus diberikan pada strategi peningkatan komunikasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian indikator secara menyeluruh.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di luar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun belum mencapai tingkat maksimal. Hal ini sesuai dengan teori optimalisasi menurut Mardiasmo yang mencakup dimensi pencapaian output, outcome, dan impact. Masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan agar proses aktivasi IKD menjadi lebih efektif dan efisien, mengingat pemerintah pusat menargetkan cakupan nasional sebesar 30%. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai sektor, baik pemerintah maupun swasta, untuk menciptakan sinkronisasi yang optimal antara program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu pelaksanaan aktivasi IKD, antara lain gangguan pada jaringan server pusat yang menghambat proses aktivasi pada jam operasional, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD dalam kehidupan sehari-hari, serta rendahnya antusiasme masyarakat akibat belum dirasakannya manfaat secara langsung. Faktor-faktor ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberhasilan program ini.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda meningkatkan intensitas sosialisasi dan promosi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti penyuluhan di sekolah, universitas, daerah terpencil, serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Selain itu, Disdukcapil juga membuka stand di berbagai

acara kemasyarakatan yang berpotensi dihadiri oleh banyak warga guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, ruang lingkup penelitian terbatas pada pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Samarinda saja, sehingga hasil dan temuan penelitian ini mungkin kurang dapat digeneralisasikan untuk daerah lain dengan karakteristik dan kondisi yang berbeda. Kedua, data yang diperoleh sangat bergantung pada informasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta responden masyarakat yang diwawancarai, sehingga terdapat kemungkinan adanya bias subjektivitas dari narasumber. Ketiga, keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian juga membatasi kedalaman analisis, terutama dalam melihat dampak jangka panjang dari pelaksanaan aktivasi IKD. Keempat, kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterbatasan akses data dapat mempengaruhi kelengkapan dan keakuratan data yang dikumpulkan selama penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, serta melakukan studi jangka panjang agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan representatif.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa arah untuk penelitian masa depan dapat disarankan. Pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah studi tidak hanya di Kota Samarinda tetapi juga di daerah lain dengan karakteristik yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, disarankan menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar data yang diperoleh lebih komprehensif dan mendalam. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada evaluasi dampak jangka panjang penggunaan IKD terhadap pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat. Keempat, kajian mendalam mengenai faktor teknologi seperti stabilitas jaringan, keamanan data, dan inovasi digital juga perlu menjadi perhatian untuk mendukung optimalisasi layanan IKD. Terakhir, penelitian di masa depan dapat mengkaji strategi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mempercepat implementasi dan penerimaan IKD agar tercipta sinergi yang optimal dalam pelayanan administrasi kependudukan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N. N., & Rahmadanik, D. N. (2023). PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL KELURAHAN KALIRUNGKUT KOTA SURABAYA JAWA TIMUR. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3.
- Dinta Fernanda Maulidya, & Agus Widiyarta. (2024). Optimalisasi Layanan Aktivasi IKD dalam Mendukung Transformasi Digital Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(1). <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.1544>
- Mara, R. A., Ghufron, G., & Sumarni, S. (2022). Analisis Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21(2). <https://doi.org/10.31293/pd.v21i2.6436>
- Marhaeni, A. A. I. N. (2020). Pengantar Kependudukan. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Masiero, S. (2023). Digital identity as platform-mediated surveillance. In *Big Data and Society* (Vol. 10, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/20539517221135176>
- Masiero, S., & Bailur, S. (2021). Digital identity for development: The quest for justice and a research agenda. In *Information Technology for Development* (Vol. 27, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/02681102.2021.1859669>
- Nggeru, A. & B. (2020). 2020 “Strategi Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Orlando, J., & Jamiah, J. (2022). Implementasi Good Governance (Studi: Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Samarinda). *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21(2). <https://doi.org/10.31293/pd.v21i2.6437>
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2). <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Rohmah, A., Abiyyu, K. Y., Elisa, C., Nurasimah, Pasapan, N. L., Safika, Firdaus, M. N., & Permatasari, N. R. (2022). Adopsi Inovasi Layanan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01). <https://doi.org/10.46937/20202239408>
- Romawati, A., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). Peningkatan Cakupan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Wonorejo. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.515>
- Situru, A., Haning, M. T., & Lambali, S. (2023). Public Service Motivation for Optimizing Digital Population Identity Services In North Toraja Regency. *Journal of Advanced Zoology*, 44(4). <https://doi.org/10.17762/jaz.v44i4.1969>
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Umam., <https://Medium.Com/>.
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18).
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2).

Zam, D. Z. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Samarinda. *Administrasi Publik*.

